

Diplomasi pertahanan dan perubahan iklim: Studi kasus Indonesia dan Selandia Baru

Defense Diplomacy and Climate Change: A Case Study of Indonesia and New Zealand

Dian Diana Rahayu, Sovian Aritonang

*Corresponding author, Email: dian.rahayu@doktoral.idu.ac.id

Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, Indonesia

Paper received: 20-07-2024; revised: 11-09-2024; accepted: 25-12-2024; published: 30-04-2025

How to cite (APA Style): Rahayu, D. D., & Aritonang, S. (2025). Diplomasi pertahanan dan perubahan iklim: Studi kasus Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 8(1), 144-153. DOI: 10.17977/um022v8i12025p144-153

Abstract

Climate change has emerged as a significant global security threat, particularly for Pacific and Southeast Asian island nations, including Indonesia and New Zealand. Threats such as rising sea levels, extreme weather events, and resource crises demand a more integrated response through defence diplomacy. This study analyzes the role of defence diplomacy in addressing climate change, focusing on regional cooperation in the Pacific and ASEAN regions. Using a qualitative approach and policy analysis, the research explores New Zealand's strategies for reducing emissions in the defence sector and its engagement in multilateral forums such as the Pacific Defence Meeting. On the other hand, the study identifies the challenges faced by Indonesia in integrating defence diplomacy with climate change policy, including the implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) and the Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). The findings highlight the need for integrated cross-national responses to build more resilient regional security against the threats of climate change.

Keywords: climate change; defense diplomacy; Indonesia; New Zealand; ASEAN; Pacific Region; regional resilience

Abstrak

Perubahan iklim telah menjadi ancaman keamanan global yang signifikan, terutama bagi negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Selandia Baru. Ancaman seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan krisis sumber daya menuntut respons yang lebih terpadu melalui diplomasi pertahanan. Studi ini menganalisis peran diplomasi pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim dengan fokus pada kerja sama di kawasan Pasifik dan ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi strategi Selandia Baru dalam mengurangi emisi sektor pertahanan serta keterlibatannya dalam forum multilateral seperti Pacific Defence Meeting. Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan diplomasi pertahanan dengan kebijakan perubahan iklim, termasuk implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan strategi LTS-LCCR 2050. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons lintas negara yang terintegrasi diperlukan guna menciptakan keamanan regional yang lebih tangguh terhadap ancaman perubahan iklim.

Kata kunci: perubahan iklim; diplomasi pertahanan; Indonesia; Selandia Baru; ASEAN; Kawasan Pasifik; ketahanan regional

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi ancaman non-tradisional yang semakin diakui secara global karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekologi, sosial, dan politik. Kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk ASEAN, menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap ancaman ini. Negara-negara di kawasan tersebut menghadapi tekanan yang besar terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air, serta meningkatnya risiko bencana alam yang mengganggu stabilitas sosial-politik. Diplomasi pertahanan, sebagai instrumen kolaboratif, mulai menempati posisi strategis dalam menghubungkan kepentingan keamanan dan upaya mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme seperti latihan militer gabungan, bantuan kemanusiaan, dan forum regional. *Triple Planet Challenges* yang dikemukakan oleh PBB—yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi—telah memperparah degradasi lingkungan dan menantang fondasi keberlanjutan sosial-ekonomi global (UN, 2021; IPCC, 2021).

Di kawasan Pasifik, negara-negara kecil seperti Tuvalu, Kiribati, dan Fiji menghadapi ancaman eksistensial akibat naiknya permukaan laut dan pergeseran pola cuaca ekstrem. Masalah ini tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko konflik dan ketidakstabilan regional (Barnett & Campbell, 2010; IPCC, 2021). Negara-negara ini menjadi contoh nyata bagaimana ancaman perubahan iklim bisa memperburuk ketegangan sosial-politik, terutama terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam yang semakin terbatas.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, juga menghadapi berbagai bentuk risiko iklim seperti kekeringan, banjir, dan badai tropis yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sumber daya alam. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan tidak hanya dipahami sebagai alat militer, melainkan juga sebagai pendekatan kolaboratif yang responsif terhadap ancaman lingkungan dan krisis kemanusiaan (Smith, 2016; Kelman, 2017). Negara-negara di kawasan ini telah mulai merespons dengan mengintegrasikan masalah perubahan iklim dalam kebijakan pertahanan mereka, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.

Selandia Baru adalah contoh negara yang telah mengambil langkah proaktif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan pertahanannya. Kebijakan seperti *Defence Policy and Strategy Statement 2023* serta keterlibatannya dalam forum *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM) menunjukkan komitmen negara ini untuk menjadikan perubahan iklim sebagai bagian integral dari strategi pertahanan mereka (NZDF, 2023). Selandia Baru juga terlibat aktif dalam mendukung negara-negara Pasifik dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui berbagai program bantuan dan kolaborasi internasional.

Sementara itu, Indonesia juga menunjukkan komitmen dalam mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan jangka panjangnya, seperti *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, serta keterlibatannya dalam kerja sama regional melalui ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM). Indonesia turut mendukung inisiatif internasional seperti REDD+ dan transisi energi terbarukan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata (Gunawan & Arumbintang, 2023). Melalui kerja sama lintas negara, Indonesia berusaha mengatasi tantangan besar terkait perubahan iklim dengan pendekatan yang berbasis pada kolaborasi antarnegara.

Namun, meskipun pentingnya diplomasi pertahanan dalam konteks perubahan iklim semakin diakui, keterkaitan antara keduanya belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur ilmiah. Masih ada kesenjangan dalam memahami bagaimana strategi pertahanan dapat diintegrasikan dengan upaya mitigasi dan adaptasi iklim secara lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah rentan seperti Pasifik dan Asia Tenggara. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi kebijakan diplomasi pertahanan yang dijalankan

oleh Selandia Baru dan Indonesia dalam merespons ancaman perubahan iklim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran diplomasi pertahanan dalam menangani ancaman perubahan iklim di kawasan Pasifik dan ASEAN. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan, strategi, dan konteks sosial-politik yang memengaruhi diplomasi pertahanan Selandia Baru dan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing negara memposisikan diri dalam menghadapi ancaman non-tradisional melalui diplomasi pertahanan, serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan peluang peningkatan kerja sama di kawasan tersebut.

Desain Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua studi kasus utama, yaitu Selandia Baru dan Indonesia, karena kedua negara memainkan peran strategis di kawasan masing-masing—Selandia Baru di Pasifik dan Indonesia di ASEAN. Selandia Baru diakui karena kebijakan iklimnya yang progresif, terutama dalam sektor pertahanan, sementara Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN berpotensi memainkan peran penting dalam integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim dengan diplomasi pertahanan regional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan kedua negara, memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi serta strategi terbaik dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap perubahan iklim.

Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Selandia Baru dan lembaga pertahanannya, di antaranya adalah *Defence Policy and Strategy Statement 2023* dan *Future Force Design Principles 2023* dari Selandia Baru, *Defence Assessment 2021*, serta *Emissions Reduction Plan (ERP) 2022* dari Selandia Baru *Defence Force (NZDF)*. Selain itu, dokumen lain yang juga menjadi sumber data primer adalah *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)*, *ASEAN Climate Change Initiative (ACCI)*, dan draft *Joint Statement By The ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus on Climate-Related and Other Natural Disasters*.

Sumber primer juga mencakup data dari hasil forum diplomasi pertahanan regional seperti *SPDMM Joint Communique 2023*, yang menyediakan informasi langsung tentang kerja sama regional di kawasan Pasifik. Selain itu, laporan resmi dari Selandia Baru *Defence Intelligence* juga dianalisis untuk memahami bagaimana intelijen pertahanan digunakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif terhadap ancaman iklim.

Sumber data sekunder meliputi literatur akademis, artikel jurnal, dan laporan dari organisasi internasional seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Sumber sekunder ini memberikan perspektif tambahan mengenai peran diplomasi pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan di kawasan Pasifik dan ASEAN.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan yang terkait dengan diplomasi pertahanan dan perubahan iklim. Studi literatur mencakup pencarian artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan publikasi lain yang relevan dengan topik ini. Analisis dokumen kebijakan dilakukan untuk mengeksplorasi isi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Selandia Baru, Indonesia, dan ASEAN mengenai diplomasi pertahanan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Teknik ini juga digunakan untuk menilai bagaimana setiap negara dan organisasi regional merespons tantangan perubahan iklim serta strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas kawasan. Studi ini juga melibatkan pengumpulan data dari forum diplomasi pertahanan regional seperti *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM).

Teknik Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Langkah-langkah triangulasi yang digunakan meliputi: pertama, Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan temuan dari dokumen kebijakan resmi dengan wawancara dan literatur akademik. Kedua, Triangulasi Metode, yang melibatkan penggunaan kombinasi analisis kebijakan, wawancara, dan studi dokumen untuk memastikan akurasi interpretasi. Ketiga, Triangulasi Teori, yang menggunakan berbagai teori relevan, seperti *Climate Security* dan *Resilience-Based Governance*, untuk memberikan konteks analitis yang lebih kuat terhadap temuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, seperti pendekatan multilateral, pengurangan emisi, peningkatan kapasitas militer, serta peran diplomasi pertahanan dalam penanggulangan bencana. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengkodean tematik, yaitu mengategorikan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti kerja sama multilateral, mitigasi perubahan iklim, kesiapan militer, dan diplomasi pertahanan. Kedua, identifikasi keterkaitan konsep, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara strategi pertahanan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim guna memahami relevansi peran diplomasi pertahanan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ketiga, interpretasi data, di mana data yang telah dikategorikan dan divalidasi kemudian dianalisis lebih lanjut dengan fokus pada perbandingan strategi antara Selandia Baru dan Indonesia, serta evaluasi terhadap peluang kerja sama regional dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui jalur diplomasi pertahanan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, terdapat keterbatasan akses terhadap data, terutama yang bersifat sensitif seperti informasi terkait operasi militer atau strategi pertahanan yang dirahasiakan, sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh peneliti. Kedua, penelitian ini memiliki ketergantungan pada dokumen publik, di mana analisis didasarkan pada dokumen-dokumen kebijakan yang dipublikasikan secara resmi. Akibatnya, aspek-aspek kebijakan yang tidak diungkapkan secara terbuka kemungkinan besar tidak tercakup dalam kajian ini. Ketiga, terdapat tantangan dalam hal cakupan regional yang luas, karena penelitian ini membahas dua kawasan yang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, yakni Pasifik dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, generalisasi temuan dari satu kawasan ke kawasan lain harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks masing-masing wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan Pasifik dan ASEAN, meskipun pendekatan yang diambil oleh Selandia Baru dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil utama penelitian ini mencakup beberapa temuan penting. Pertama, Selandia Baru telah mengadopsi strategi yang lebih proaktif dalam diplomasi pertahanan terkait perubahan iklim, dengan menekankan pengurangan emisi di sektor pertahanan serta partisipasi aktif dalam forum multilateral seperti *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM). Kedua, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim ke dalam strategi pertahanan nasional. Meskipun telah memiliki inisiatif seperti *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050), integrasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam sektor pertahanan. Ketiga, kerja sama multilateral terbukti penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan kawasan terhadap bencana yang dipicu oleh perubahan iklim, namun implementasi kerja sama ini masih dihadapkan pada kendala koordinasi serta keterbatasan infrastruktur di beberapa negara ASEAN.

Perubahan Iklim sebagai Ancaman Keamanan di Pasifik dan ASEAN

Perubahan iklim telah mengubah peta keamanan di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara secara signifikan, menggeser perhatian dari ancaman militer tradisional menuju ancaman non-tradisional yang bersumber dari lingkungan. Negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu, Kiribati, dan Fiji berada di garis depan dampak perubahan iklim, menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Menurut *SPDMM Joint Communique 2023*, ancaman ini tidak hanya mengancam keberlanjutan negara-negara tersebut, tetapi juga meningkatkan ketidakstabilan politik dan sosial, yang berpotensi memicu konflik terkait migrasi iklim dan persaingan sumber daya yang semakin terbatas.

Di ASEAN, dampak perubahan iklim juga sangat terasa. Negara-negara seperti Indonesia mengalami efek signifikan terhadap ketahanan pangan, infrastruktur, dan sumber daya air. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyoroti bahwa peningkatan intensitas cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai mengancam stabilitas kawasan. Situasi ini menunjukkan bahwa respons multilateral sangat dibutuhkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim di kawasan ini. Di Pasifik, Selandia Baru memimpin kerja sama regional yang erat melalui *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM), sementara Indonesia mengambil peran penting di ASEAN dengan memanfaatkan platform seperti *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) dan *ASEAN Climate Change Initiative* (ACCI).

Analisis Perbandingan Selandia Baru dan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selandia Baru mengadopsi pendekatan proaktif dalam menghadapi perubahan iklim melalui diplomasi pertahanan. Kebijakan seperti *Emissions Reduction Plan* (ERP) 2022 dan *Future Force Design Principles* 2023 menekankan pengurangan emisi militer dan penggunaan energi terbarukan dalam operasi militer, yang mencerminkan komitmen Selandia Baru dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sembari meningkatkan kesiapan militer. Diplomasi pertahanan Selandia Baru tidak hanya berfokus pada mitigasi emisi gas rumah kaca, tetapi juga mencakup aspek adaptasi melalui dukungan teknis dan peningkatan kapasitas negara-negara kecil di Pasifik. Sebagai negara dengan kapasitas pertahanan yang lebih maju, Selandia Baru telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kemampuan negara-negara tetangganya dalam merespons krisis iklim. Dengan berbagi pengetahuan dan

teknologi rendah karbon, Selandia Baru membantu negara-negara ini meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Indonesia, di sisi lain, menghadapi tantangan berbeda, termasuk hambatan dalam regulasi energi terbarukan dan mitigasi deforestasi, yang memengaruhi efektivitas kebijakan iklim domestiknya serta peran diplomasi pertahanan di ASEAN. Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat mitigasi perubahan iklim di ASEAN melalui diplomasi pertahanan. Inisiatif multilateral seperti *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* dan *ASEAN Climate Change Initiative (ACCI)* menawarkan platform bagi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas mitigasi perubahan iklim di negara-negara ASEAN lainnya. Program REDD+ yang diterapkan oleh Indonesia menunjukkan komitmen negara ini dalam mengurangi emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, yang juga dapat diintegrasikan dengan diplomasi pertahanan.

Analisis ini menunjukkan bahwa, sementara Selandia Baru telah berhasil mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi pertahanannya, Indonesia masih perlu memperkuat upaya diplomasi pertahanan terkait mitigasi perubahan iklim di tingkat regional, terutama melalui ASEAN. Ini menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam forum multilateral seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*.

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi pertahanan di ASEAN, terutama melalui kerangka kerja seperti ADMM-Plus. Dengan keterlibatan yang lebih aktif dalam latihan militer yang berfokus pada skenario bencana terkait iklim, Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam membangun ketahanan regional. Penguatan kolaborasi multilateral melalui ADMM-Plus akan meningkatkan interoperabilitas militer di kawasan ASEAN yang diperlukan untuk merespons bencana alam akibat perubahan iklim secara efektif. Ini menunjukkan bahwa ancaman perubahan iklim membutuhkan kerja sama lintas negara untuk mencapai respons yang terpadu dan komprehensif. Selain itu, kerja sama dengan mitra ekstra-regional seperti Amerika Serikat dan Jepang dapat meningkatkan akses pada teknologi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani ancaman iklim. Indonesia juga dapat mendorong ASEAN untuk memperkuat sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil guna menciptakan respons yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap bencana iklim, sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur penting melalui investasi pada sistem peringatan dini. Semua ini menunjukkan bahwa ancaman perubahan iklim menuntut respons lintas negara yang terpadu dan kolaboratif untuk menciptakan keamanan regional yang lebih tangguh.

Kontribusi terhadap Literasi Kebijakan Iklim

Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menangani ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim. Melalui perbandingan antara Selandia Baru dan Indonesia, studi ini memberikan gambaran tentang strategi yang dapat diterapkan oleh negara-negara lain di ASEAN dan Pasifik dalam meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim. Analisis ini memperlihatkan bahwa diplomasi pertahanan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Dengan mengedepankan latihan militer gabungan dan kolaborasi teknis, diplomasi pertahanan memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapsiagaan mereka dalam merespons bencana terkait iklim.

Rekomendasi untuk Aksi Proaktif Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin ASEAN dalam menangani perubahan iklim melalui diplomasi pertahanan. Dengan mengadopsi teknologi rendah karbon dan

memperkuat kerja sama militer di ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kesiapsiagaan regional dalam menghadapi bencana terkait iklim. Selain itu, diplomasi pertahanan yang lebih terintegrasi akan memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai pemimpin regional dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mempromosikan pelatihan bersama dan berbagi teknologi berkelanjutan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat berperan lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sambil meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan.

Pendekatan Multilateral dalam Diplomasi Pertahanan di Pasifik dan ASEAN

Pendekatan multilateral memainkan peran penting dalam diplomasi pertahanan modern, khususnya dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang bersifat global dan lintas batas negara. Di kawasan Pasifik, Selandia Baru telah memimpin upaya multilateral melalui forum seperti *South Pacific Defence Ministers' Meeting (SPDMM)* dan *Pacific Islands Forum (PIF)*. Melalui forum ini, Selandia Baru mempromosikan koordinasi militer regional yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terkait perubahan iklim. Forum SPDMM, misalnya, telah menghasilkan *Joint Communique 2023* yang menekankan pentingnya peningkatan interoperabilitas antar negara untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana.

Selandia Baru juga berperan sebagai tuan rumah *Pacific Defence Meeting 2024*, yang diharapkan menjadi platform bagi negara-negara Pasifik untuk memperkuat kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim. Kahler (2014) menyoroti bahwa pendekatan multilateral memungkinkan negara-negara di kawasan untuk berbagi sumber daya, teknologi rendah karbon, dan praktik terbaik dalam respons terhadap bencana alam. Pendekatan ini juga memungkinkan negara-negara yang memiliki kapasitas pertahanan yang lebih terbatas, seperti Kiribati dan Tuvalu, untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara dengan kapabilitas militer yang lebih maju.

Di ASEAN, kerangka kerja multilateral juga menjadi fokus utama dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* dan *ASEAN Climate Change Initiative (ACCI)*, negara-negara anggota ASEAN dapat mengakses dukungan teknis dan finansial dari negara-negara yang lebih maju, baik di dalam kawasan maupun dari mitra luar kawasan. *Draft Joint Statement by the ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus on Climate-Related and Other Natural Disasters* menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas kolektif ASEAN dalam menghadapi bencana terkait iklim.

Indonesia, sebagai anggota terbesar ASEAN, memiliki peran strategis dalam memperkuat diplomasi pertahanan regional melalui forum ADMM-Plus. ADMM-Plus menyediakan platform bagi negara-negara ASEAN dan mitra dialog, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan melakukan latihan gabungan dalam skenario bencana. Pendekatan ini memperkuat ketahanan ASEAN melalui kolaborasi yang terstruktur dan komprehensif. Indonesia memiliki peluang untuk memimpin inisiatif ini dengan mendorong latihan yang berfokus pada kesiapsiagaan terhadap bencana terkait iklim dan memfasilitasi adopsi teknologi rendah karbon di kawasan.

Pendekatan multilateral di Pasifik dan ASEAN menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat militer, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun ketahanan kolektif. Hulme dan Newell (2015) menegaskan bahwa melalui kerja sama multilateral, negara-negara dapat memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Dengan demikian, kolaborasi lintas batas melalui diplomasi pertahanan memungkinkan negara-negara di Pasifik dan ASEAN untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Evaluasi Strategi Diplomasi Pertahanan Selandia Baru

Selandia Baru telah berhasil memanfaatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen pendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim, dengan menempatkan fokus pada pengurangan emisi di sektor pertahanan serta peningkatan kerja sama regional. Keberhasilan strategi ini tercermin dalam beberapa aspek penting. Pertama, melalui implementasi kebijakan *Emissions Reduction Plan* (ERP) 2022, Selandia Baru menargetkan pengurangan emisi sektor pertahanan sebesar 30–50% pada tahun 2030, yang menunjukkan komitmen konkret terhadap transisi ke arah pertahanan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, Selandia Baru juga menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi pertahanan kawasan Pasifik, khususnya melalui forum *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM), yang memberikan peluang bagi negara-negara kepulauan kecil untuk mengakses dukungan teknis dan logistik dalam menghadapi bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.

Meski demikian, strategi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan negara-negara kecil di Pasifik pada bantuan eksternal, baik dari sisi pendanaan maupun kapasitas teknis. Selain itu, biaya tinggi dalam transisi menuju teknologi rendah karbon di sektor pertahanan juga menjadi tantangan tersendiri, yang memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama lintas sektor agar strategi ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Evaluasi Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim dengan strategi pertahanan nasional. Tantangan utama mencakup kurangnya koordinasi lintas sektor, yang menghambat integrasi antara kebijakan iklim dan strategi pertahanan; keterbatasan infrastruktur dan teknologi, yang menyulitkan transisi menuju sistem pertahanan rendah karbon; serta kendala regulasi dan politik, yang memperlambat proses pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan mitigasi iklim dalam sektor pertahanan.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan peran diplomasi pertahanan di kawasan ASEAN. Peluang tersebut dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan forum *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) guna mendorong kerja sama dalam latihan militer gabungan yang berfokus pada respons terhadap bencana terkait iklim. Selain itu, kolaborasi dengan mitra strategis seperti Jepang dan Australia juga dapat berkontribusi dalam membangun kapasitas pertahanan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim di tingkat regional.

Implikasi Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian ini, nampak bahwa diplomasi pertahanan memiliki potensi sebagai instrumen yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan lintas sektor dapat diintegrasikan secara sinergis. Terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, bagi Indonesia, penting untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga pertahanan guna memastikan bahwa strategi mitigasi perubahan iklim dapat terimplementasi secara nyata dalam kebijakan pertahanan nasional. Kedua, Selandia Baru disarankan untuk memperluas kerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi rendah karbon dengan negara-negara ASEAN sebagai bagian dari upaya membangun kapasitas mitigasi perubahan iklim di kawasan tersebut. Ketiga, kedua negara sebaiknya memanfaatkan secara optimal platform multilateral seperti *South Pacific Defence Ministers' Meeting* (SPDMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) untuk memperkuat kerja sama regional dalam diplomasi pertahanan yang berfokus pada isu perubahan iklim. Dengan strategi yang lebih terpadu dan kolaboratif, Indonesia dan Selandia Baru dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan ketahanan kawasan terhadap

ancaman perubahan iklim serta memperkuat peran diplomasi pertahanan dalam menjawab tantangan lingkungan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan Pasifik dan ASEAN, dengan Selandia Baru mengambil pendekatan proaktif dalam pengurangan emisi sektor pertahanan dan kerja sama multilateral, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan iklim dengan strategi pertahanannya. Kendala utama Indonesia mencakup kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan regulasi, meskipun terdapat peluang untuk memperkuat peran diplomasi pertahanan dalam forum regional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Kerja sama multilateral yang lebih erat, investasi dalam teknologi rendah karbon, serta peningkatan koordinasi kebijakan menjadi langkah strategis bagi kedua negara dalam meningkatkan ketahanan kawasan terhadap ancaman perubahan iklim dan memastikan stabilitas keamanan regional yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Rahmawati, D., Prabowo, H., & Kurniawan, A. (2023). Tata kelola perubahan iklim untuk ketahanan perkotaan di Indonesia. *Journal of Urban Climate Adaptation*, 15(3), 112-130.
- Agung, P., Galudra, G., Van Noordwijk, M., & Maryani, R. (2014). Reform or reversal: The impact of REDD+ readiness on forest governance in Indonesia. *Climate Policy*, 14(6), 748-768.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2023). *Cermati isu perubahan iklim, Indonesia akselerasi kebijakan energi hijau dan targetkan enhanced nationally determined contribution pada 2030*.
- Barnett, J., & Campbell, J. (2010). *Climate change and small island states: Power, knowledge, and the South Pacific*. Earthscan.
- Brockhaus, M., Di Gregorio, M., & Carmenta, R. (2021). Multi-level governance and power in climate change policy networks. *Global Environmental Change*, 23(4), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102324>.
- Brockhaus, M., Di Gregorio, M., Djoudi, H., Moeliono, M., Pham, T. T., & Wong, G. Y. (2021). The forest frontier in the global south: Climate change policies and the promise of development and equity. *Ambio*, 50, 2238-2255.
- Codeveloping Evidence in Southeast Asia. (2022). *Adaptasi sanitasi di Indonesia: Dampak dan resiliensi terhadap perubahan iklim*.
- Ding, D. K., & Beh, S. E. (2022). Climate change and sustainability in ASEAN countries. *Sustainability*, 14(2), 999.
- Draft Joint Statement By The Asean Defence Ministers' Meeting-Plus On Climate-Related And Other Natural Disasters 2024.
- Granderson, A. A. (2017). The role of traditional knowledge in building adaptive capacity for climate change: Perspectives from Vanuatu. *American Meteorological Society*, 9(3), 545-561. <https://doi.org/10.1175/wcas-d-16-0094.1>
- Gunawan, A. H., & Arumbinang, A. S. (2023). The climate change litigation in Indonesia: A human rights-based approach. *Environmental Law Review*, 45(2), 89-105.
- Gunawan, Y., & Arumbinang, M. H. (2023). The climate change litigation based human rights approach in corporations: Prospects and challenges. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 288-307.
- Hulme, M., & Newell, P. (2015). *Climate governance and multilateralism*. Polity Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Sixth assessment report: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Kahler, M. (2014). *Multilateral diplomacy and global security: New challenges, new responses*. Columbia University Press.
- Karim, R., Ghazali, F., & Ansari, A. H. (2020). Renewable energy regulations in Indonesia and India: A comparative study on legal framework. *JILS*, 5, 361.

- Kelman, I. (2017). *Climate change and the Pacific Islands: Adaptation and security*. Springer.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Indonesia berkomitmen penuh tangani perubahan iklim*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/-indonesia-berkomitmen-penuh-tangani-perubahan-iklim>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Tantangan dan komitmen dalam menangani perubahan iklim.
- McDonald, M. (2020). *Climate change and security: Examining the role of defence diplomacy in the South Pacific*. Global Environmental Politics.
- McDonald, P. (2020). New Zealand and the South Pacific defence ministers' meeting: Strengthening regional cooperation in climate change response. *Defence Policy Journal*, 12(1), 55-72.
- McNamara, K. E., & Des Combes, H. J. (2015). *Climate change and human mobility in the Pacific: An overview*. Asia Pacific Viewpoint.
- MJ, N. A., Putra, A. K., & Sipahutar, B. (2023, May 27). Perdagangan karbon: Mendorong mitigasi perubahan iklim diantara mekanisme pasar dan prosedur hukum. *Selat: Journal of Strategic and Global Studies*, 10(2), 91-107. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.4853>
- New Zealand Defence Force. *Defence assessment 2021*. Wellington: Ministry of Defence, 2021.
- New Zealand Defence Force. (2023). *Defence policy and strategy statement 2023*. Wellington: Ministry of Defence.
- New Zealand Defence Force. (2022). *Emissions reduction plan 2022*. Wellington: Ministry of Defence.
- New Zealand Defence Force. (2023). *Future force design principles 2023*. Wellington: Ministry of Defence.
- New Zealand Defence Force. (2021). *Navigating a shifting world*. Wellington: Ministry of Defence.
- New Zealand Defence Intelligence. (2023). *Unclassified presentation*. Wellington: Ministry of Defence.
- New Zealand Ministry of Defence. (2023). New Zealand strategy management & assessment.
- New Zealand to Host 2024 Pacific Defence Meeting. (2024). [Beehive.govt.nz](https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-host-2024-pacific-defence-meeting). Accessed October 2, 2024. <https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-host-2024-pacific-defence-meeting>.
- Ratuva, S. (2019). *The global south and climate change: Dilemmas, options and political tensions*. Palgrave Macmillan.
- Smith, D. (2016). *Diplomacy and defence: New approaches to global security*. Oxford University Press.
- Smith, R. (2016). Diplomacy and security: The role of defence diplomacy in addressing non-traditional security threats. *Security and International Relations Journal*, 11(2), 145-167.
- South Pacific Defence Ministers' Meeting. (2023). *SPDMM Joint Communique 2023*. Retrieved from <https://spdmm.intl/summit-2023>.
- Sudarma, M., & As-syakur, A. R. (2018). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian di Provinsi Bali. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1), 87-87. <https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p07>
- The structure and pattern of REDD+ projects. (2022). *Forest Management Review*. <https://www.reddplus.org>
- UNFCCC. (2020). *Annual report on climate action and mitigation*. UNFCCC.